

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pengaturan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum; Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan formulasi pengaturan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum; Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi formulasi pengaturan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku (*law in book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang undanga (*statute approach*). Berdasar penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan oleh Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Majelis Kehormatan Notaris diformulasikan kepada pengaturan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam bentuk proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, dan kewenangan menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan Notaris. Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris adalah untuk menjamin agar Notaris selalu bertindak sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Sinkronisasi Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum sangat diperlukan terutama berkaitan dengan : ketimpangan kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris, ketidaksinkronan pengaturan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN), pertentangan pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan benturan kepentingan diantara Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Kata Kunci : Sinkronisasi, pengawasan dan pembinaan notaris, penegakan hukum.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the formulation of Notary supervision arrangements by the Notary Supervisory Council and notary guidance by the Notary Honorary Council in law enforcement; To find out and analyze the implementation of the formulation of Notary supervision arrangements by the Notary Supervisory Council and guidance for Notaries by the Notary Honorary Council in law enforcement; To find out and analyze the synchronization of the formulation of Notary supervision arrangements by the Notary Supervisory Council and guidance for Notaries by the Notary Honorary Council in law enforcement. The type of legal research carried out is normative juridical research or research that analyzes law, whether written in a book (law in book) or law decided by judges through a court process, the approach to the problem used is the statute approach. Based on the research, it can be concluded that Supervision by Notaries by the Notary Supervisory Council and the guidance of the Notary Supervisory Council are formulated in regulating the authority of the Notary Supervisory Council in the form of a process of supervision and examination of Notaries, and the authority to impose certain sanctions on Notaries who have been proven to have violated the law against the rules of the Notary Office. . Duties and functions of the Notary Honorary Council Fostering are to examine applications submitted by investigators, public prosecutors and judges and provide approval or rejection of requests for approval of notaries' summons to attend investigations, prosecutions and judicial processes and provide protection to Notaries in connection with Notary's obligation to keep the contents of the Deed confidential. The implementation of Notary supervision by the Notary Supervisory Council is to ensure that Notaries always act in accordance with the legal principles underlying their authority and can avoid abuse of authority or trust given. Synchronization of Notary Supervision by the Notary Supervisory Council and guidance by the Notary Honorary Council in law enforcement is very necessary, especially in relation to: imbalance of authority between the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council, the inconsistency in setting the authority of the Notary Honorary Council (MKN) and the Notary Supervisory Council (MPN), conflict of exercising the authority of the Notary Honorary Council (MKN) and the Notary Supervisory Council (MPN) and the conflict of interest between the Notary Honorary Council (MKN) and the Notary Supervisory Council (MPN).

Keywords: Synchronization, supervision and coaching of notaries, law enforcement.